

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang – Undangan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Burhan Asshopa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rinaka Cipta, Jakarta, 2012.

Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang - undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 1992.

H. Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Raka Cipta, Bandung, 2013.

Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Edisi Revisi)*, PT Kanisius, Bandung, 2020

Setyo Utomo dan Dwi Haryadi, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Danadyaksa, Yogyakarta, 2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

1. Jurnal, Makalah, dan Skripsi

Ananda Prima Yursita dan Dian Agung Wicaksono, *Kompabilitas Rencana Zonasi Wilaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai Rencana Tata Ruang yang Integratif*, dalam Jurnal Rechtsvinding , Vol. 6, No. 2, Agustus 2017.

Bambang Yunianto, *Kajian Problema Pertambangan Timah Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional*, Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol. 5, No. 3, Juli 2009.

Dudung Abdullah, *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*, Jurnal Hukum Positum, Volume 1, Nomor 1, Desember 2016.

Nasrullah Nazsir, *Good Governance*, Jurnal Mediator, Vol. 4, No.1, 2003.

Susianty, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Kegiatan Pertambangan Timah Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perzinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke – IV.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

3. Internet atau Website

<https://www.Mangabaya.co.id/2023/03/12/diuji-komitmen-zero-tambang-di-bangka-belitung/amp/>, di akses pada 18 Juni 2023.

<https://geoportal.esdm.go.id/minerba/>, dikases pada 30 juni 2025 Pukul 13.35.

Kasworo, Yerrico, “*Urgensi Penyusunan Pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*”, dalam Jurnal *Rechtsvinding* Online, (2017), https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?d=233 diakses pada 28 Juni 2023